

**PARTISIPASI PEMUKA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN TEGALAMPEL
KABUPATEN BONDOWOSO**

*Participation Of Community Leaders In The Implementation Of Development Planning
Deliberations In Karang Anyar Village, Tegalampel District, Bondowoso Regency*

Yayang Novandita, Kahar Haerah

Universitas Muhammadiyah Jember
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember
e-mail : yayangdita14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: (1) untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi pemuka masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang); (2) untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh pemuka masyarakat pada kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan ditentukan secara purposive yang terdiri dari lima informan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dalam pelaksanaan musrenbang terdapat empat bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh para pemuka masyarakat diantaranya : (1) partisipasi dalam rapat perencanaan pembangunan, (2) partisipasi dalam penyampaian pendapat, (3) partisipasi dalam pemberian data/informasi, (4) partisipasi dalam perumusan pembuat keputusan. Dari keempat bentuk partisipasi tersebut ditemukan ternyata tidak semua tokoh masyarakat terlibat secara aktif terutama dalam hal penyampaian pendapat. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa ada beberapa tokoh masyarakat yang hanya sekedar datang tanpa menyampaikan pendapat atau usulan. Mereka hanya sekedar menyetujui pendapat atau usulan yang disampaikan oleh tokoh lainnya. Sedangkan dalam bentuk partisipasi lainnya seperti partisipasi dalam rapat perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pemberian data/informasi, dan partisipasi dalam perumusan pembuat keputusan para tokoh masyarakat dapat dikatakan terlibat secara aktif. Kedua, Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang, diantaranya : (1) kuatnya intervensi dari segelintir elit, (2) usulan masyarakat yang kandas, (3) lemahnya dasar dan usulan masyarakat, (4) sistem top down, (5) musrenbang dilaksanakan pada saat jam kerja. Dari kelima faktor penghambat kegiatan Musrenbang tersebut ditemukan ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan Musrenbang, contohnya dalam sistem *top down* tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat meyakini bahwa tidak ada sistem *top down* didalam kegiatan Musrenbang tersebut, namun berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara oleh salah seorang informan menemukan fakta bahwa didalam kegiatan Musrenbang di Desa Karanganyar masih terdapat sistem *top down* mengingat masih banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi oleh pemerintah.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemuka Masyarakat, Musrenbang

ABSTRACT

This study has two objectives, namely: (1) to describe the forms of participation of community leaders in the implementation of the Development Plan Deliberation (Musrenbang); (2) to describe the inhibiting factors faced by community leaders in the implementation of the Development Plan Deliberation (Musrenbang). This study used descriptive qualitative method. Informants were determined purposively consisting of five informants. Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: first, in the implementation of musrenbang there are four forms of participation that have been carried out by community leaders including: (1) participation in development planning meetings, (2) participation in expressing opinions, (3) participation in providing data/information, (4) participation in the formulation of decision makers. From the four forms of participation, it was found that not all community leaders were actively involved, especially in terms of expressing opinions. The results of the study indicate the fact that there are several community leaders who just come without expressing their opinions or suggestions. They just agree to the opinions or suggestions submitted by other figures. Meanwhile, in other forms of participation, such as participation in development planning meetings, participation in providing data/information, and participation in the formulation of decision makers, community leaders can be said to be actively involved. Second, there are several inhibiting factors in the implementation of Musrenbang, including: (1) strong intervention from a handful of elites, (2) failed community proposals, (3) weak basis and community proposals, (4) top down system, (5) Musrenbang is implemented during working hours. Of the five inhibiting factors for Musrenbang activities, it was found that there were several factors that became obstacles in Musrenbang activities, for example in the top down system, community leaders or community leaders believed that there was no top down system in the Musrenbang activities, but based on the author's observations from the results of interviews by one of the an informant found the fact that in Musrenbang activities in Karanganyar Village there is still a top-down system considering that there are still many community proposals that have not been realized by the government.

Keywords: Participation, Community Leaders, Musrenbang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan adalah program pokok dari pemerintah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia tersebut, maka diharapkan adanya keterlibatan beberapa komponen didalamnya dimana salah satu komponen yang sangat penting adalah partisipasi dari seluruh masyarakat yang bisa mendukung seluruh kegiatan pembangunan yang akan di implementasikan. Berdasarkan Permendagri No. 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seluruh masyarakat secara aktif didalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan berarti mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dengan mengakomodasi berbagai latar belakang masyarakat yang beragam untuk menghasilkan rencana yang inklusif dan responsif. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk dan tahapan partisipasi yang beragam sesuai dengan kondisi pemangku kepentingannya, serta saluran komunikasi yang tepat (Damurski, Pluta & Andersen, 2019).

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu langkah terpenting dalam proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Partisipasi masyarakat dilakukan dalam dua forum, yaitu Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan relevan tentang masalah, kebutuhan, dan potensi mereka.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi pemuka masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), apakah para tokoh masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh pemuka masyarakat pada kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi pemuka masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dan juga untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh pemuka masyarakat pada kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan. Selanjutnya secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk ikut andil dalam menyalurkan pendapat ketika diadakannya kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), juga agar masyarakat lebih peka terhadap permasalahan yang ada di Desa tersebut, sehingga memudahkan pemerintah untuk mendapatkan hasil yang efektif dan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Partisipasi

Partisipasi artinya keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan bisa berupa keterlibatan mental, emosi serta fisik dalam menggunakan kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan juga mendukung hasil pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan, Made Pidarta (Dwiningrum, 2011). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi I. N., 2010). Dengan begini sikap emosional individu dan kelompok musyawarah merupakan hasil dorongan dari perseorangan yang dapat mewujudkan sebuah hasil positif dalam kegiatan ikut serta mengeluarkan pendapat.

Wungou (2016) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas, berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu :

1. Partisipasi dalam perencanaan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Bentuk – Bentuk Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Mulyadi (2011) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif pada bentuk participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit dan participation in evaluation. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Participation in decision making (Partisipasi dalam pembuatan keputusan)
Participation in decision making merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses mengambil keputusan dengan menyampaikan pendapat dan saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan dibuat.
2. Participation in implementation (Partisipasi dalam pelaksanaan)
Participation in implementation merupakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan yang berbentuk kontribusi. Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:34) menyatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keterlibatan masyarakat didalam memberikan kontribusi yang berguna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berbentuk antara lain : Kontribusi dengan tenaga, Kontribusi dengan uang, Kontribusi dengan bahan (material).
3. Partisipasion in benefit.
Partisipasion in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan adalah bentuk peran dimana dalam partisipasi tersebut bisa memberikan banyak manfaat positif bagi masyarakat dan pemerintah.
4. Partisipasion in evaluation
Partisipasion in evaluation merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengawasi pelaksanaan hasil-hasil perencanaan pembangunan.

Pemuka Masyarakat

Pemuka Masyarakat ialah sosok masyarakat yang sangat disegani, mereka juga selalu menjadi panutan masyarakat lain, selalu didengar dan juga selalu diminta pendapatnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau keputusan tentang suatu rencana kegiatan masyarakat. Figur pemimpin ataupun kehidupan sosialnya sangat melekat erat pada pemuka atau tokoh masyarakat, akan tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan gelar tersebut, dengan hadirnya pemuka masyarakat juga bisa menciptakan keadaan yang damai. Peran pemuka masyarakat yang efektif semakin diakui di Indonesia seperti di tempat lain, sebagai kontributor penting bagi pembangunan sosial lokal. Pendekatan kepemimpinan didasarkan pada premis bahwa pengembangan individu meningkatkan kapasitas masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah suatu forum rembuk warga yang membahas tentang persoalan potensi Desa dan masalah yang ada di Desa tersebut. Diadakannya Musrenbang ini guna untuk mendapatkan hasil yang layak menurut skala prioritas, yang berguna untuk dasar program kerja pemerintah Desa. Model *top down* seringkali digunakan oleh negara berkembang.

Persoalan ataupun aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu masyarakat ikut serta disetiap program-program pembangunan. (Supeno, 2005:2-3).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan hasil penemuan yang diamati. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa dan gejala (Sugiyono,2013:1-2). Didalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan fenomena, peristiwa dan gejala partisipasi masyarakat didalam kegiatan musrenbangdes di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dan faktor penghambat yang dihadapi oleh pemuka masyarakat dalam berpartisipasi. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitian kualitatif ini tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti dan keberadaan peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti menggambarkan suatu masalah yang nyata dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa KarangAnyar Kecamatan Tegal Ampel. Pemilihan Desa KarangAnyar sebagai lokasi penelitian dikarenakan terdapat faktor penghambat dalam partisipasi pemuka masyarakat pada kegiatan Musrenbang.

Sumber Data

Menurut pendekatan penelitian, peneliti akan mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan melalui observasi fenomena dan wawancara informan, sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive. Artinya, informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian yang sedang diselidiki. Informan penelitian ini adalah para tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Informan dalam penelitian ini dipilih 5 (lima) orang yang meliputi:

1. Tokoh Agama (1 orang)
2. Ketua Dusun (1 orang)
3. Tokoh Perempuan (1 orang)
4. Tokoh Pemuda (1 orang)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi.
2. Wawancara

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Teknik ini menyajikan empat komponen analisis: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dalam rapat perencanaan pembangunan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam rapat perencanaan pembangunan adalah menghadiri rapat perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Bentuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut serta dalam pembangunan desa (Musrenbang). Perencanaan pembangunan di desa dirumuskan melalui Musrenbang. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kemauan, kemampuan dan luangnya waktu berpengaruh terhadap luasnya partisipasi warga masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam rapat perencanaan pembangunan dia menyatakan bahwa:

“Kalau untuk partisipasi saya dalam rapat perencanaan pembangunan selaku kepala dusun terutama saya juga bisa disebut tokoh yang lumayan berpengaruh untuk RT 03 ini saya hanya menerima usulan dari ketua RT, RW atau pelopor pemuda di sekitar sini. Partisipasi yang dapat saya lakukan hanya sebatas menyampaikan usulan atau masukan dari ketua RT, RW tadi yang sebelumnya sudah menemui saya untuk membicarakan hal hal terkait kemajuan di desa kami”. (wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam rapat perencanaan pembangunan dia menyatakan bahwa :

“Ya seperti yang saya bilang tadi mbak, saya lebih seringnya bicara soal usulan usulan posyandu, PKK . yang berbaur tentang wanita wanita di Desa ini saja. Karena kalau untuk hal-hal lainnya saya rasa sudah ada RT, RW, dan bapak Kepala Dusun juga mbak. Saya rasa itu sudah cukup mewakili, Cuma kalau soal ini kan jarang di perhatikan karna mungkin mereka laki-laki ya mbak jadi harus ada penggeraknya , contohnya seperti saya” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam rapat perencanaan pembangunan dia menyatakan bahwa :

”Saya lebih ke menyampaikan aspirasi warga saja mbak, contohnya warga minta jalan di paving, minta selokan diperlebar dan hal-hal yang berkaitan dengan pengajian bapak-bapak Rt itu aja mbak tapi untuk sekarang masih belum sempat terlaksana untuk pengajiannya itu, mengingat keadaan covid yang belum reda” (wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam rapat perencanaan pembangunan dia menyatakan bahwa :

“Partisipasi penyampaian pendapat sama seperti yang lainnya saja dek , tapi lebih ke arah usulan pemuda pemudi di Desa. Karna kalau usulan-usulan tentang jalan,paving itu biasanya sudah

terwakilkan dek, beda dengan usulan kita para muda-mudi di Desa Karanganyar ini” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda terlibat secara aktif mewakili masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan di tingkat Desa melalui Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Partisipasi dalam penyampaian pendapat

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam penyampaian pendapat pada rapat perencanaan pembangunan adalah memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kemudian disampaikan pada suatu rapat, maka dapat menghasilkan suatu gagasan yang bisa menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan. Pendapat masyarakat diharapkan dapat memberi kegunaan yang besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dilapangan berikut ini rincian usulan masing-masing pemuka masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa.

No	Nama Pemuka Masyarakat	Pekerjaan/Asal Dusun	Usulan
1	Buhari	Kasun/Jembatan Kecil	1. Perbaiki jalan desa 2. Penambahan saluran listrik
2	Yani	Tokoh perempuan/ Jembatan Kecil	1. Penambahan alat di posyandu 2. Penambahan alat ibu-ibu PKK
3	Hasan	Ketua RT 03/ Jembatan Kecil	1. Paving untuk jalan Desa 2. Pelebaran Selokan
4	Rizal	Tokoh pemuda/ Jembatan Kecil	Perbaiki lapangan voli
5	Suhudi Jailani	Kasun/ Song Barat	2. Perbaiki jalan desa 3. Penambahan saluran listrik
6	M. Razi	Kasun/ Song Tengah	1. Perbaiki jalan desa 2. Saluran air bersih 3. Penambahan saluran listrik
7	Ponidi Andi Wijaya	Kasun/ Krajan	1. Perbaiki jalan desa 2. Penambahan saluran listrik
8	Joko Purwadi	Kasun/ Trebung	1. Perbaiki jalan desa 2. Penambahan saluran listrik
9	Misyono	Kasun/ Blok Pasar	1. Perbaiki jalan desa

			2. Plengsengan 3. Penambahan saluran listrik
--	--	--	---

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam penyampaian pendapat dia menyatakan bahwa:

“Karena saya juga menjabat sebagai Kepala Dusun mbak, saya biasanya menyampaikan pendapat atau usulan saya ketika ada rapat internal maupun eksternal. Tapi kalau usulan eksternal biasanya seringkali tokoh tokoh lain yang saya utamakan, karena mereka lebih tahu apa yang terjadi di masyarakat” (wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam penyampaian pendapat dia menyatakan bahwa :

“Untuk saya sendiri hanya sebatas menerima atau mengumpulkan komplek dari ibu-ibu di Desa dalam kegiatan posyandu,PKK lalu saya sampaikan saja nantinya di rapat perencanaan pembangunan ini. Contohnya di posyandu ini kurang alat dan di PKK kurang tikar gitu aja mbak ” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Bu Yani selaku bagian dari tokoh perempuan Desa Karanganyar yang cukup berpengaruh menambahkan bahwa beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun Karanganyar kurang responsif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat saat pelaksanaan Musrenbang.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam penyampaian pendapat dia menyatakan bahwa :

“Kalau untuk sekarang ini cara penyampaian pendapatnya itu beda sama yang sebelum sebelumnya ya mbak, karna kan sekarang covid-19 ini masih ada mbak. Kalau dulu itu kita bisa berargumente sampe kita bisa dapat apa yang kita mau, nah kalau sekarang ini sistemnya di catat aja di kertas mbak. Apa yang kita butuhkan itu kemarin hanya disuruh di tulis saja” (wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam penyampaian pendapat dia menyatakan bahwa :

“Cara saya menyampaikan pendapat biasanya saya akan konsultasikan dahulu dek, saya konsultasikan sama pak RT,RW, Kepala Dusun juga. Supaya nanti akhirnya tidak ada salah paham antara warga yang lain, terus juga nanti cara penyampaiannyapas rapat saya juga enak gitu dek tidak berbelit belit tetapi tau pointnya apa yang mau saya sampaikan” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda terlibat secara aktif mewakili masyarakat dalam penyampaian pendapat. Namun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak

berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, sehingga dalam kegiatan Musrenbang tersebut tokoh yang tidak aktif hanya akan menyetujui apa yang telah di usulkan oleh tokoh lainnya. Karena mereka tidak mengetahui arah dan tujuan mereka ikutserta dalam kegiatan tersebut.

Partisipasi dalam pemberian data/informasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam pemberian data/informasi adalah memberikan data atau informasi pada setiap pertemuan. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan kepada pihak masyarakat karena belum terdapat peraturan yang mewajibkan hal itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam pemberian data atau informasi dia menyatakan bahwa:

“Pemberian data sendiri itu sudah cukup jelas menurut saya mbak. Karena saya selaku Kepala dusun juga ingin masyarakat tahu bahwa apa yang kami perjuangkan untuk mereka benar benar nyata adanya, sehingga mereka tidak mengira kami hanya diam saja mbak” (wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam pemberian data/informasi dia menyatakan bahwa :

“Pemberian data atau informasi di kegiatan tersebut sudah cukup baik mbak, karna saya tahu sendiri semua harus transparan. Jadi semisal ada usulan usulan masyarakat yang belum tercapai kita tahu dimana kendalanya, sebabnya apa. Jadi semua warga juga tahu mbak kenapa sekarang terhambat belum berjalan gitu mbak” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Bu Yani selaku bagian dari tokoh perempuan Desa Karanganyar yang cukup berpengaruh menambahkan bahwa dia agak kesulitan memperoleh data atau informasi yang akan menjadi bahan dalam pelaksanaan Musrenbang, misalnya data terkait Posyandu, PKK, Sadar Kesehatan, dan lain-lain. Selama ini pihak Pemerintah Desa Karanganyar tidak menyediakan data-data tersebut, sehingga terpaksa harus keliling ke rumah-rumah secara door to door untuk meminta data-data tersebut dari pihak masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam pemberian data/informasi dia menyatakan bahwa :

“Kejelasan pemberian data atau informasi dari rapat yang kemarin saya hadiri itu transparan mbak, kalau memang ada usulan yang harus didahulukan yang lain harus sabar dulu nunggu karna kan ndak bisa semuanya langsung dikerjakan mbak. Seandainya ada hambatan untuk usulan yang diberikan biasanya nanti akan di musyawarahkan lagi enaknyanya bagaimana” (wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Menurut pengakuan bapak Hasan selaku salah seorang pemuka masyarakat bahwa cara penyampaian pendapat di saat pandemi covid-19 ini kurang maksimal, karena mereka dibatasi untuk berpendapat.

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam pemberian data/informasi dia menyatakan bahwa : “Saat ini masih dalam tahap di seleksi mungkin ya dek , mana yang lebih di dahulukan, tapi kemarin itu sudah di kasih tau kalau ada kendala sedikit di ADD” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda terlibat secara aktif mewakili masyarakat dalam pemberian data/informasi. Sehingga data/informasi apapun yang telah di sepakati atau tidak di sepakati oleh pemerintah Desa masyarakat juga dapat mengetahuinya secara transparan.

Partisipasi dalam proses perumusan pembuatan keputusan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa salah satu partisipasi dalam proses perumusan pembuatan keputusan adalah masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses mengambil keputusan dengan menyampaikan pendapat dan saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan dibuat. Adanya reformasi menyebabkan partisipasi dilaksanakan melalui konsultasi publik dan dialog publik pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam proses perumusan pembuatan keputusan dia menyatakan bahwa:

“Karena saya juga menduduki selaku Kepala Dusun mbak, maka biasanya dalam hal pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Musrenbang saya ikut aktif, namun saya juga selalu memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat lainnya untuk ikut aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan semua tokoh ini sangat penting, karena hasil pengambilan keputusan menyangkut untuk kepentingan seluruh masyarakat”. (wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang proses perumusan pembuatan keputusan pendapat dia menyatakan bahwa :

“Proses pembuatan keputusan di dalam kegiatan Musrenbang saya ikut terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Hanya saja dalam proses pembuatan keputusan tidak semua masyarakat bisa terlibat didalamnya mengingat keadaan saat ini yang tidak kondusif karena pandemi covid-19 ini mbak” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam proses perumusan pembuatan keputusan dia menyatakan bahwa :

“Dalam proses pembuatan keputusan pada saat kegiatan Musrenbang saya juga ikut terlibat, karena hal ini menyangkut kepentingan bersama. Pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil pengambilan keputusan ini mengikat semua pihak, sehingga mau tidak mau seluruh peserta harus mengikutinya.” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang partisipasinya dalam perumusan pembuat keputusan dia menyatakan bahwa :

“Dalam proses pembuatan keputusan sendiri dek kita dan tokoh lainnya juga ikut andil dalam hal ini. Karena kan ini kebutuhan kita semua warga, jadi harus ada warga yang tau untuk pengambilan keputusan ini. Hasil pengambilan keputusan ini mengikat semua pihak, sehingga seluruh peserta harus menaatinya.” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda terlibat secara aktif mewakili masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Semuanya ikut andil dalam proses pembuat keputusan karena bagaimanapun usulan atau pendapat yang di sampaikan kepada pemerintah Desa, mereka semua harus mengetahui di terima atau tidaknya usulan tersebut.

Kuatnya intervensi dari sebagian elit

Dalam pelaksanaan Musrenbang desa peranan elite berfungsi untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. Musrenbang digunakan oleh para elite untuk mempertahankan jaringan-jaringan atau kekuasaan di wilayah desa. Peran elite dan lembaga desa dilakukan untuk mengontrol dan mengintervensi pembangunan desa, dimana dalam kontrol dan intervensi elite sendiri terdapat unsur politis. Intervensi elite dalam pelaksanaan Musrenbang secara tidak langsung telah membuat pola hubungan yang terjadi karena kekuasaan elite tersebut, dimana hubungan tersebut menganggap bahwa elite telah memberikan kontribusi untuk masyarakat desa dan kepentingan masyarakat desa dan timbal baliknya untuk elite adalah masyarakat desa akan berkontribusi dan mendorong tercapainya tujuan elite untuk meraih kepentingan di daerah desa tersebut, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk memenangkan elite dalam pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat kuatnya intervensi dari sebagian elit dia menyatakan bahwa:

“Kalau bicara hal seperti itu rasanya tidak ada yang mempengaruhi ya mbak, baik dari orang orang yang berkedudukan tinggipun Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami di Desa Karanganyar ini. Semuanya demi kepentingan masyarakat agar tidak ada salah paham”(wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat kuatnya intervensi dari sebagian elit dia menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah saya rasa tidak ada mbak, yang saya rasakan sekarang sudah lebih baik sistemnya. Mungkin kalau penghambat ya hanya di ADD saja mbak, karena itu memang hal yang paling sensitif untuk dibahas ya mbak. Jadi ya untuk keseluruhan sudah bagus” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai

pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat kuatnya intervensi dari sebagian elit dia menyatakan bahwa :

“Tidak ada mbak, semuanya bersatu menurut saya ini kan demi kenyamanan warga juga mbak, mengingat keputusan akhir dari rapat perencanaan pembangunan ini merupakan pernyataan, saran serta keinginan masyarakat Desa itu sendiri”(wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat kuatnya intervensi dari sebagian elit dia menyatakan bahwa :

“Menurut saya dek hasil yang didapatkan merupakan permintaan rakyat. Tidak ada kaitannya dengan intervensi dari sebagian elit, karena pada dasarnya jika ingin menyampaikan sesuatu pemerintah Desa sudah memberikan wadah untuk bermusyawarah di dalam kegiatan rapat perencanaan pembangunan”(wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat yang berhasil diwawancarai, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda semuanya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang intervensi dari sebagian elit tidaklah menjadi penghambat, karena Musrenbang itu dilaksanakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan penulis saat wawancara dengan salah seorang informan dapat diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukkan ternyata ada pihak-pihak tertentu yang berusaha agar hanya usulan program yang dianggap prioritas dapat masuk pada ADD yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah.

Usulan masyarakat yang kandas

Pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa Karanganyer selalu diikuti oleh para tokoh masyarakat. Setiap tokoh masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan usulan terkait dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Menurut pengamatan penulis memang banyak usulan dari masyarakat yang pada akhirnya kandas atau tidak terealisasi, karena banyaknya pihak yang berkepentingan yang ikut bermain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat usulan masyarakat yang kandas dia menyatakan bahwa:

“Sebisa mungkin kami mencarikan jalan terbaik untuk usulan usulan yang sudah diterima mbak, namun saya juga tidak menganggap semuanya diterima baik oleh atasan mungkin karena usulan yang masyarakat berikan akan dikaji terlebih dahulu ya mbak, dan itu membutuhkan proses yang lumayan cukup memakan waktu”(wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat usulan masyarakat yang kandas dia menyatakan bahwa :

“Usulan masyarakat sangat diterima baik oleh pemerintah Desa mbak, hanya saja mungkin masih di masak lagi apakah usulan dari masyarakat mendesak atau tidak, karena kan memang usulannya banyak ya mbak jadi mungkin pihak pemerintah Desa juga perlu melihat mana yang

mendesak terlebih dulu” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat usulan masyarakat yang kandas dia menyatakan bahwa :

“Usulan masyarakat yang kandas itu belum ada mbak, karna ya itu tadi kita kemarin hanya disuruh menulis saja apa yang kurang dari keluhan-keluhan masyarakat. Tapi masih belum tahu kedepannya gimana karna menunggu ADD ini mbak”(wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat usulan masyarakat yang kandas dia menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan musrenbang kemarin yang saya tau semua usulan diterima dengan baik dek, respon dari perangkat Desa juga sangat baik menerima usulan masyarakat yang lumayan banyak menurut saya, namun Kepala Desa menerima usulan dari masyarakat dengan sangat selektif” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat yang berhasil diwawancarai, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda semuanya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang usulan masyarakat yang kandas tidak menjadi penghambat, karena menurut salah seorang informan usulan yang disampaikan dalam kegiatan Musrenbang merupakan hal yang penting. Maka dari itu usulan yang disampaikan semua diterima dengan baik oleh pemerintah Desa. Namun berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara oleh salah seorang informan dapat diketahui bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua usulan dapat diterima oleh pihak pemerintah, karena ada beberapa usulan yang dianggap tidak relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lemahnya dasar dan usulan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan amat penting, karena pembangunan bertujuan menyejahterakan masyarakat. Faktanya, partisipasi masyarakat di Desa Karanganyer masih menemui banyak kendala, salah satunya adalah Lemahnya dasar dan usulan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat lemahnya dasar dan usulan masyarakat dia menyatakan bahwa:

“Mungkin kalau disebut lemah tidak juga ya mbak, karena masyarakat juga ingin yang terbaik untuk Desanya. Sebenarnya bisa dibilang usulan dari masyarakat itu sendiri sangat baik, hanya saja cara penyampaiannya yang terlalu tergesa-gesa sehingga kami mungkin kurang memahami betul apa yang diinginkan dari masyarakat itu sendiri”(wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang

faktor penghambat lemahnya dasar usulan masyarakat dia menyatakan bahwa :

“Usulan masyarakat sudah bagus menurut saya mbak, mereka sudah paham betul apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasa kurang dari perhatian pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan posyandu atau PKK di Desa Karanganyar ini” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat lemahnya dasar dan usulan masyarakat dia menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah tidak ada hambatan untuk kegiatan kemarin karna usulan dari warga itu sudah di rundingkan lagi mbak, jadi sebelum kita menyampaikan ke Pemerintah Desa kami berserta warga sudah berunding dulu, supaya gak ada miss komunikasi mbak” (wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat lemahnya dasar dan usulan masyarakat dia menyatakan bahwa :

“Masyarakat mengusulkan sesuatu yang mereka inginkan dan dianggap penting untuk pembangunan Desa, sehingga proses musrenbang berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, tapi tidak lepas juga dari hambatan-hambatan kecil lainnya ya dek” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat yang berhasil diwawancarai, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda semuanya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang lemahnya dasar dan usulan masyarakat berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan lemahnya dasar dan usulan masyarakat itu dinilai tidak menjadi penghambat dalam kegiatan Musrenbang. Karena semua usulan yang akan di sampaikan pada saat kegiatan Musrenbang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu kepada pemuka masyarakat setempat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya usulan masyarakat yang kandas.

Sistem top down

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan amat penting, karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang tidak hanya sebatas pada kuatnya intervensi dari sebagian elit, usulan masyarakat yang kandas, dan masih lemahnyadasar dan usulan masyarakat, tetapi juga sistemnya yang seringkali masih bersifat top down. Masyarakat memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan dalam Musrenbang, namun pada tahap akhir peran dari pihak Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten sangat menentukan diterima tidaknya berbagai usulan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat sistem top down dia menyatakan bahwa:

“Tidak ada mbak, karena kita disini juga butuh masukan atau usulan dari masyarakat agar bisa

berjalan lebih baik Pemerintah Desa kedepannya, karna disini anggaphlah kita juga sama-sama belajar agar terus bisa berbenah demi Desa kita. Supaya kita bisa menciptakan kebanggaan tersendiri gitu mbak”(wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat sistem top down dia menyatakan bahwa :

“Tidak mbak, saya merasa itu sebabnya pemerintah Desa mengumpulkan kita semua agar tahu apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan di Desa kami. Dari hal kecilpun kami selalu bermusyawarah dengan Pemerintah Desa agar masyarakat tahu langsung apa yang di katakan oleh Pemerintah Desa untuk kenyamanan kita” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat sistem top down dia menyatakan bahwa :

“Sampai saat ini masih normal-normal saja mbak, semua berjalan sesuai rencana meskipun ada kendala sedikit. Karna mustahil suatu kegiatan berjalan tanpa adanya kendala mbak meskipun kendalanya hampir tidak terlihat. Tapi semua bisa dikatakan dalam batas wajar”(wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat sistem top down dia menyatakan bahwa :

“Dalam kegiatan rapat kemarin, usulan dari masyarakat diterima oleh Perangkat Desa, namun Kepala Desa ingin mengkaji lebih dalam lagi untuk usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak serta merta langsung di laksanakan juga kan dek” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat yang berhasil diwawancarai, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda semuanya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang sistem top down dari hasil wawancara dengan salah seorang informan tidak menjadi penghambat di dalam kegiatan Musrenbang. Karena sistem top down sendiri di rasa tidak menjadi kendala yang sangat besar mengingat dari pihak pemerintah Desa sendiri menerima semua usuan masyarakat dengan baik. Namun berdasarkan pengamatan penulis setelah melakukan wawancara dengan salah seorang informan mendapatkan fakta di lapangan bahwa sistem top down masih terjadi, mengingat tidak semua usulan masyarakat dapat di realisasikan oleh pemerintah.

Musrenbang dilaksanakan pada jam kerja

Salah satu faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan Musrenbang adalah seringkali dilaksanakan pada jam kerja, yaitu antara Selasa, Rabu dan Kamis. Bagi sebagian tokoh masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap tentu saja pelaksanaan pada jam kerja dapat dianggap

menghambat, namun bagi tokoh masyarakat lainnya mungkin hal itu bukan menjadi faktor penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang bernama Buhari selaku pemuka masyarakat di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat musrenbang dilaksanakan pada saat jam kerja dia menyatakan bahwa:

“Sama sekali tidak mengganggu mbak, karena bagaimanapun juga ini kewajiban saya selaku tokoh masyarakat, dan juga Kepala Dusun sudah menjadi hal yang wajib untuk ada pada acara musrenbang tersebut. Bagaimanapun keadaannya pasti saya melonggarkan waktu untuk rapat musrenbang mbak”(wawancara dengan Buhari, tanggal 23 Maret 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang bernama Ibu Yani selaku tokoh perempuan di Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat musrenbang dilaksanakan pada saat jam kerja dia menyatakan bahwa :

“Tidak mengganggu mbak, walaupun dirasa waktunya tidak tepat pasti dihari sebelumnya sudah ditanyakan terlebih dahulu ada waktu kosongnya dihari apa seperti itu sih mbak. Jadi sekarang ini lebih mudah saja mengakses segala sesuatunya ndak seperti dulu lagi mbak” (wawancara dengan Ibu Yani, tanggal 23 Maret 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku ketua RT dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyer ketika ditanyakan tentang faktor penghambat musrenbang dilaksanakan pada saat jam kerja dia menyatakan bahwa :

“Tidak mbak, karena semua sudah terjadwal . Jadi sudah harus melonggarkan waktu pada saat rapat tersebut. Masak iya mbak sudah ditentukan tanggal segini masih mengeluh di hari H sedang ada acara, kecuali memang dalam keadaan mendesak saja. Karna sebelumnya sudah dikabari biasanya mbak untuk ditanya kapan waktu longgarnya”(wawancara dengan bapak Hasan, tanggal 23 Maret 2022).

Berikutnya, hal senada juga disampaikan oleh mas Rizal selaku tokoh pemuda dan sekaligus sebagai pemuka masyarakat Desa Karanganyar ketika ditanyakan tentang faktor penghambat musrenbang dilaksanakan pada saat jam kerja dia menyatakan bahwa :

“Tidak mengganggu sama sekali dek, karena proses musrenbang penting dilakukan mengingat ada transparansi antara perangkat Desa dengan masyarakat. Hal ini penting terhadap keberlangsungan pembangunan Desa” (wawancara dengan mas Rizal, tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang seluruhnya adalah pemuka masyarakat dapat diketahui bahwa seluruh tokoh atau pemuka masyarakat yang berhasil diwawancarai, seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh perempuan dan tokoh pemuda semuanya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan pada saat jam kerja pada saat wawancara dengan salah seorang informan dinilai tidak mengganggu kegiatan para tokoh masyarakat di Desa Karanganyar, semua bisa di atur atau di sesuaikan jadwal dengan cara ditanyakan terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat yang akan menghadiri kegiatan Musrenbang. Selanjutnya tokoh masyarakat dan pihak pemerintah Desa akan menyetujui hari atau tanggal berapa yang mereka usulkan untuk kegiatan Musrenbang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan musrenbang terdapat empat bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh para pemuka masyarakat diantaranya : (1) partisipasi dalam rapat perencanaan pembangunan, (2) partisipasi dalam penyampaian pendapat, (3) partisipasi dalam pemberian data/informasi, (4) partisipasi dalam perumusan pembuat keputusan. Dari keempat bentuk partisipasi tersebut ditemukan ternyata tidak semua tokoh masyarakat terlibat secara aktif terutama dalam hal penyampaian pendapat. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa ada beberapa tokoh masyarakat yang hanya sekedar datang tanpa menyampaikan pendapat atau usulan. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang, diantaranya : (1) kuatnya intervensi dari segelintir elit, (2) usulan masyarakat yang kandas, (3) lemahnya dasar dan usulan masyarakat, (4) sistem top down, (5) musrenbang dilaksanakan pada saat jam kerja. Dari kelima faktor penghambat kegiatan Musrenbang tersebut ditemukan ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan Musrenbang, contohnya dalam sistem top down tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat meyakini bahwa tidak ada sistem top down didalam kegiatan Musrenbang tersebut, namun berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara oleh salah seorang informan mendapatkan fakta bahwa didalam kegiatan Musrenbang di Desa Karanganyar masih terdapat sistem top down mengingat masih banyak usulan masyarakat yang belum terealisasikan dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Karanganyar Kecamatan Tegal Ampel seharusnya intervensi dari segelintir elit agar dihilangkan agar tidak menjadi faktor penghambat dalam pengusulan berbagai rencana pembangunan di tingkat Desa.
2. Dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Karanganyar Kecamatan Tegal Ampel sebaiknya sistem top down dapat di hilangkan agar pemerintah Desa lebih mengutamakan usulan dari masyarakat dan juga lebih selektif dalam menerima usulan dari masyarakat sehingga solusi yang di inginkan masyarakat tepat sasaran.
3. Dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Karanganyar Kecamatan Tegal Ampel seharusnya partisipasi pemuka masyarakat dalam menyampaikan pendapat di dalam kegiatan Musrenbang tokoh masyarakat harus lebih aktif dalam menyampaikan usulan atau pendapat sehingga kegiatan musrenbang dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Damurski, Ł., Pluta, J., Maier, K., & Andersen, H. T. (2019). Stakeholders in the local service centre: who should be involved in the planning process? Insights from Poland, Czech Republic and Denmark. *Bulletin of Geography. Socio-economic Series*, 43(43), 91-106.
- Dwiningrum, N. R. (2011). Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Program Studi Teknik Mesin Alat Berat Politeknik Balikpapan. *JIP (Jurnal Ilmiah Politeknik)*, 3(1).
- Mulyadi. (2011). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat
- Sumaryadi, I. Nyoman. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wungow, C. E. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1164.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Supeno, Eko. (2005). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 18(2), 1-5